

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil analisis yang sudah dijabarkan sebelumnya penulis dapat menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Lampung Timur memiliki 7 (tujuh) komponen laporan keuangan dasar yang dihasilkan dari laporan penganggaran, amandemen terhadap perubahan timbangan anggaran, neraca, operasi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, faktur, faktur, faktur, faktur Perubahan dan rekaman keuangan. Penjelasan (bukan bagian dari laporan keuangan ini). Implementasi manajemen keuangan daerah di Kabupaten Pemerintah Oriental Lampung mengacu pada pemegang buku standar (SAP) berdasarkan pada pengumpulannya.
2. Dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2020, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur telah berupaya semaksimal mungkin untuk mengikuti dan melaksanakan semua "Pedoman dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku dan Peraturan". . Namun terdapat kendala dan kendala dalam penerapannya yaitu: keterbatasan kapasitas di wilayahnya dan rendahnya kualitas sumber daya aparatur yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.

#### **B. Saran**

Adapun saran yang dapat peneliti sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Untuk anggaran berikutnya, Pemerintah Lampung Timur Pemerintah harus dalam penyajian laporan keuangannya, yang secara konstan dikelola oleh ketentuan-ketentuan negara 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi negara. Untuk presentasi yang sangat efektif Tahap keuangan regional, implementasi dan penyelesaian regional yang disampaikan dapat bermanfaat bagi pengguna laporan
2. Pemerintah Kabupaten Lampung Timur seringkali dituntut untuk

melakukan sosialisasi, “Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Terkait PP No.71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Peraturan Lain Terkait” Pengelolaan Keuangan Daerah.

3. Untuk anggaran ke depan, Pemkab Lampung Timur bisa lebih baik lagi jika melakukan berbagai upaya agar kondisi yang stabil, aman dan kondusif tetap terjaga untuk memenuhi tuntutan masyarakat yang menginginkan transparansi, akuntabilitas, dan kehidupan bebas terpenuhi pemerintah. dapat diwujudkan dengan KKN

